



## Kendaraan Bermotor Dilarang Melintas di Malioboro Pada Pekan Ketiga

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Daerah DIY akan menguji coba pembatasan kendaraan bermotor di Kompleks Kepatihan pada pekan ketiga Januari 2026 sebagai upaya awal mengurangi emisi dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan di lingkungan perkantoran pemerintahan.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan, kebijakan tersebut masih bersifat uji coba dan akan dilaksanakan satu kali, yakni pada Jumat di pekan ketiga Januari. "Uji cobanya kita rencananya di Januari ini, di minggu ketiga. Minggu ketiga, tapi kita masih diskusi. Namun sudah kita siapkan kemarin bersama Pak Teguh dari Karo Umum," ujar Ni Made.

Ia menjelaskan, pembatasan kendaraan bermotor di Kepatihan merupakan tindak lanjut surat edaran Sekda yang sejak awal memang dirancang sebagai uji coba. "Ini kan kita mau uji coba. Surat edaran Sekda

itu kan uji coba untuk bebas kendaraan bermotor di wilayah Kepatihan," katanya.

Menurut Ni Made, uji coba diperlukan agar Pemda DIY dapat memetakan berbagai konsekuensi kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas. "Awalnya kan mau langsung keluar kebijakan, tapi saya bilang oke, uji coba dulu. Namanya uji coba itu nanti akan kita evaluasi, dari sisi kelebihan dan kekurangannya seperti apa, sebelum kemudian diberlakukan secara masif," ujarnya.

Selain bertujuan mengurangi emisi, uji coba ini juga dimaksudkan untuk mendorong perubahan perilaku, khususnya di kalangan aparat sipil negara. "Jadi harapan besar kita, mungkin sedikit, kita bisa berkontribusi dalam mengurangi emisi di wilayah. Kepatihan ini juga berada di sumbu filosofis," kata Ni Made.

Pemda DIY sekaligus mengampanyekan penggunaan angkutan umum, pemanfaatan

kantong parkir resmi, serta transportasi *non-motorized*. Selama uji coba, pegawai Pemprov DIY didorong memarkir kendaraan di lokasi-lokasi yang telah disiapkan, seperti Beskalan, TM (Teras Malioboro), maupun Kemandan. Ni Made menegaskan, kesiapan dan kapasitas ruang parkir menjadi salah satu aspek yang akan dievaluasi.

"Contohnya tadi sudah menyinggung soal ruang parkir. Ternyata bisa jadi kesulitan juga untuk ruang parkirnya, atau bagaimana dengan teman-teman yang misalnya harus ngelaju membawa kendaraan bermotor dari rumah," ujarnya.

Meski demikian, kendaraan dinas tertentu tetap dikecualikan. "Untuk kendaraan pelat merah yang memang dikecualikan, misalnya untuk operasional Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, itu masih tetap boleh. Kemudian kalau memang ada tugas luar yang menggunakan kendaraan dinas, saya kira itu juga me-

mungkinkan," kata Ni Made. Ia menambahkan, pengecualian ini juga menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.

Pengawasan selama uji coba akan melibatkan Satpol PP bersama Biro Umum selaku penanggung jawab kawasan Kepatihan. "Salah satunya dengan Satpol PP dan teman-teman di bawah koordinasi Biro Umum, karena kawasan ini memang menjadi tanggung jawab Biro Umum," ujarnya. Temuan seperti parkir sembarangan atau keterbatasan kapasitas parkir akan dicatat sebagai bahan evaluasi.

Ni Made menegaskan, uji coba ini tidak dibarengi kegiatan Car Free Day maupun acara khusus. "Oh, tidak. Ini murni uji coba," katanya.

Ke depan, apabila dinilai efektif dan kekurangannya dapat disempurnakan, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Kepatihan berpeluang diterapkan secara definitif pada hari-hari tertentu. **(kpc)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 04 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005